



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2025

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Walikota Langsa Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Belanja Tidak Terduga, untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga;
- b. bahwa sehubungan adanya dana tambahan bantuan operasional mukim dalam mendukung program pembangunan gampong tahun 2025 berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 100.3.1/639/2025 tentang Penetapan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Dana Tambahan Bantuan Operasional Mukim Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan perubahan/penambahan anggaran terhadap Perangkat Daerah terkait;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas dan sehubungan adanya asumsi perubahan/penambahan/pengurangan/penyesuaian kegiatan pada Perangkat Daerah yang berdampak pada pergeseran anggaran antar objek belanja yang mendesak untuk dilakukan, perlu merevisi/merubah Peraturan Walikota Langsa Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2025 untuk pertama kalinya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2025;

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

2. Undang- ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6381);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Tranfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah

tentang ...

- tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 23. Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1025);
 24. Peraturan Walikota Langsa Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2025 Nomor 1128);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Walikota Langsa Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2025 Nomor 1128) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2025 semula sebesar Rp.913.838.093.664,- (Sembilan ratus tiga belas miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta sembilan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp.1.517.772.000,- (Satu miliar lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.915.335.865.664,- (Sembilan ratus lima belas miliar tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) yang terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah; dan
- b. Pendapatan Transfer.

2. Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (3), diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp.703.231.747.454,- (Tujuh ratus tiga miliar dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp.1.517.772.000,-

(Satu ...

(Satu miliar lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.704.749.519.454,- (Tujuh ratus empat miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima ratus sembilan belas ribu empat ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan Transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.680.779.085.000,- (Enam ratus delapan puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.22.452.662.454,- (Dua puluh dua miliar empat ratus lima puluh dua ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp.1.517.772.000,- (Satu miliar lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.23.970.434.454,- (dua puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah Tahun 2025 semula sebesar Rp.919.046.589.664,- (Sembilan ratus sembilan belas miliar empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp.1.517.772.000,- (Satu miliar lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.920.564.361.664,- (Sembilan ratus dua puluh miliar lima ratus enam puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) yang terdiri dari:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

4. Ketentuan Pasal 7 Ayat (1), sampai dengan Ayat (6), diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a semula sebesar Rp.714.733.198.827,- (Tujuh ratus empat belas miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp.27.037.467.753,- (Dua puluh tujuh miliar tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.741.770.666.580,- (Tujuh ratus empat puluh satu

miliar ...

miliar tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.438.136.209.082,- (Empat ratus tiga puluh delapan miliar seratus tiga puluh enam juta dua ratus Sembilan ribu delapan puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp.14.708.357.014,- (Empat belas miliar tujuh ratus delapan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu empat belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.423.427.852.068,- (Empat ratus dua puluh tiga miliar empat ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu enam puluh delapan rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.265.636.286.699,- (Dua ratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus delapan juta tujuh puluh satu ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp.20.602.271.867,- (Dua puluh miliar enam ratus dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.286.238.558.566,- (Dua ratus delapan puluh enam miliar dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).
 - (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.222.080.000,- (Satu miliar dua ratus dua puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.116.934.000,- (Seratus enam belas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.1.339.014.000,- (Satu miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat belas ribu rupiah).
 - (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp.9.738.623.046,- (Sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp.2.059.996.900,- (Dua miliar lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.11.798.619.946,- (Sebelas miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah).
 - (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp.0,- (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp.18.966.622.000,- (Delapan belas miliar sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.18.966.622.000,- (Delapan belas miliar sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 8 Ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b semula sebesar Rp.43.807.163.484,- (Empat puluh tiga miliar delapan ratus tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp.7.618.947.468,- (Tujuh miliar enam ratus delapan belas juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.51.426.110.952,- (Lima puluh satu miliar empat ratus dua puluh enam juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - d. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - e. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.28.496.203.209,- (Dua puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tiga ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.7.616.447.468,- (Tujuh miliar enam ratus enam belas juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.36.112.650.677,- (Tiga puluh enam miliar seratus dua belas juta enam ratus lima puluh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.6.464.853.360,- (Enam miliar empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.012.571.895,- (Tujuh miliar dua belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah);
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.771.035.020,- (Satu miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tiga puluh lima ribu dua puluh rupiah).
- (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.62.500.000,- (Enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah).

6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c semula sebesar Rp.34.415.107.860,- (Tiga puluh empat miliar empat ratus lima belas juta seratus tujuh ribu delapan ratus enam puluh rupiah) berkurang sebesar Rp.22.149.530.660,- (Dua puluh dua miliar seratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.12.265.577.200,- (Dua belas miliar dua ratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

- 7. Ketentuan lampiran I diubah dengan ringkasan APBK yang diklarifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- 8. Ketentuan lampiran II diubah dengan ringkasan APBK yang diklarifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- 9. Ketentuan lampiran III diubah dengan rincian APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 pada :
 - a. Urusan Pemerintahan : 1.01 – Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan.
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa.
 - b. Urusan Pemerintahan : 1.02 – Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan.
Organisasi : 1.02.1.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kota Langsa.
 - c. Urusan Pemerintahan : 1.03 – Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa.
 - d. Urusan Pemerintahan : 1.06 – Bidang Sosial
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial Kota Langsa
 - e. Urusan Pemerintahan : 2.07 – Bidang Tenaga Kerja
Organisasi : 2.06.0.00.0.00.01 Dinas Ketenagakerjaan Kota Langsa
 - f. Urusan Pemerintahan : 2.08 – Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

		Keluarga Berencana Kota Langsa.
g. Urusan Pemerintahan	:	2.11 – Bidang Lingkungan Hidup
Organisasi	:	2.11.0.00.0.00.01 Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa.
h. Urusan Pemerintahan	:	2.12 – Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Organisasi	:	2.12.0.00.0.00.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa.
i. Urusan Pemerintahan	:	2.13 – Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Organisasi	:	2.13.0.00.0.00.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa.
j. Urusan Pemerintahan	:	3.15 – Bidang Perhubungan
Organisasi	:	3.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan Kota Langsa.
k. Urusan Pemerintahan	:	3.25 – Bidang Kelautan dan Perikanan.
Organisasi	:	3.25.3.27.2.09.01 Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa.
l. Urusan Pemerintahan	:	3.31 – Bidang Perindustrian.
Organisasi	:	3.31.3.30.2.17.02 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Langsa.
m. Urusan Pemerintahan	:	4.01 – Sekretariat Daerah.
Organisasi	:	4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah Kota Langsa.
n. Urusan Pemerintahan	:	4.01 – Sekretariat DPRD.
Organisasi	:	4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat DPR Kota Langsa.
o. Urusan Pemerintahan	:	5.02 – Keuangan.
Organisasi	:	5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa.
p. Urusan Pemerintahan	:	5.03 – Kepegawaian.
Organisasi	:	5.03.5.04.0.00.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Langsa.
q. Urusan Pemerintahan	:	6.01 – Inspektorat Daerah
Organisasi	:	6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat Kota Langsa
r. Urusan Pemerintahan	:	8.01 – Kesatuan Bangsa dan Politik
Organisasi	:	8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Langsa.
s. Urusan Pemerintahan	:	9.01 – Kekhususan Aceh

Organisasi : 9.01.0.00.0.00.01 Dinas
Syariat Islam dan Pendidikan
Dayah Kota Langsa.
t. Urusan Pemerintahan : 9.01 – Kekhususan Aceh
Organisasi : 9.01.0.00.0.00.03 Sekretariat
Baitul Mal Kota Langsa.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 24 Juni 2025 M
28 Dzulhijjah 1446 H

 WALIKOTA LANGSA,
JEFFRY SENTANA S PUTRA

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 24 Juni 2025 M
28 Dzulhijjah 1446 H

 Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,
SURIYATNO

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2025 NOMOR 1133



KOTA LANGSA

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	210.606.346.210,00	210.606.346.210,00	0,00
4.1.01	Pajak Daerah	33.905.738.179,00	33.905.738.179,00	0,00
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	6.013.753.136,00	0,00	-6.013.753.136,00
4.1.01.01.03	PKB-Mobil Penumpang-Minibus	6.013.753.136,00	0,00	-6.013.753.136,00
4.1.01.01.03.0002	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	6.013.753.136,00	0,00	-6.013.753.136,00
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	3.563.985.043,00	0,00	-3.563.985.043,00
4.1.01.03.04	PBBKB-Bahan Bakar Lainnya	3.563.985.043,00	0,00	-3.563.985.043,00
4.1.01.03.04.0001	PBBKB Bahan Bakar Lainnya	3.563.985.043,00	0,00	-3.563.985.043,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	503.000.000,00	503.000.000,00	0,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	503.000.000,00	503.000.000,00	0,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	503.000.000,00	503.000.000,00	0,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.881.000.000,00	1.881.000.000,00	0,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.881.000.000,00	1.881.000.000,00	0,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.881.000.000,00	1.881.000.000,00	0,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	441.000.000,00	441.000.000,00	0,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	441.000.000,00	441.000.000,00	0,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	441.000.000,00	441.000.000,00	0,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	13.700.000.000,00	13.700.000.000,00	0,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	13.700.000.000,00	13.700.000.000,00	0,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	13.700.000.000,00	13.700.000.000,00	0,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	61.000.000,00	61.000.000,00	0,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	61.000.000,00	61.000.000,00	0,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	61.000.000,00	61.000.000,00	0,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.751.500.000,00	1.751.500.000,00	0,00
4.1.01.15.01	PBBP2	1.751.500.000,00	1.751.500.000,00	0,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	1.751.500.000,00	1.751.500.000,00	0,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.593.000.000,00	5.593.000.000,00	0,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	5.593.000.000,00	5.593.000.000,00	0,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	5.593.000.000,00	5.593.000.000,00	0,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0,00	6.013.753.136,00	6.013.753.136,00
4.1.01.20.01	Opsen PKB	0,00	6.013.753.136,00	6.013.753.136,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	0,00	6.013.753.136,00	6.013.753.136,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	0,00	3.563.985.043,00	3.563.985.043,00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	0,00	3.563.985.043,00	3.563.985.043,00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	0,00	3.563.985.043,00	3.563.985.043,00
4.1.02	Retribusi Daerah	2.818.940.500,00	2.818.940.500,00	0,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	1.955.673.000,00	1.955.673.000,00	0,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	217.253.000,00	217.253.000,00	0,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	217.253.000,00	217.253.000,00	0,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.163.000.000,00	1.163.000.000,00	0,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.163.000.000,00	1.163.000.000,00	0,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	508.900.000,00	508.900.000,00	0,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	508.900.000,00	508.900.000,00	0,00
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	64.520.000,00	64.520.000,00	0,00
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	64.520.000,00	64.520.000,00	0,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	662.636.500,00	662.636.500,00	0,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	625.530.000,00	625.530.000,00	0,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	460.500.000,00	460.500.000,00	0,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	41.330.000,00	41.330.000,00	0,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	113.950.000,00	113.950.000,00	0,00
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	11.800.500,00	11.800.500,00	0,00
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	11.800.500,00	11.800.500,00	0,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	16.285.000,00	16.285.000,00	0,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	16.285.000,00	16.285.000,00	0,00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	4.021.000,00	4.021.000,00	0,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	4.021.000,00	4.021.000,00	0,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	200.631.000,00	200.631.000,00	0,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	200.631.000,00	200.631.000,00	0,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	200.631.000,00	200.631.000,00	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	896.824.266,00	896.824.266,00	0,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	896.824.266,00	896.824.266,00	0,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	896.824.266,00	896.824.266,00	0,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	896.824.266,00	896.824.266,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	172.984.843.265,00	172.984.843.265,00	0,00
4.1.04.05	Jasa Giro	147.481.265,00	147.481.265,00	0,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	147.481.265,00	147.481.265,00	0,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	147.481.265,00	147.481.265,00	0,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	231.258.000,00	231.258.000,00	0,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	231.258.000,00	231.258.000,00	0,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	231.258.000,00	231.258.000,00	0,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	167.606.104.000,00	167.606.104.000,00	0,00
4.1.04.16.05	Pendapatan BLUD dari APBD	167.606.104.000,00	167.606.104.000,00	0,00
4.1.04.16.05.0001	Pendapatan BLUD dari APBD	167.606.104.000,00	167.606.104.000,00	0,00
4.1.04.22	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
4.1.04.22.01	Pendapatan Zakat	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
4.1.04.22.01.0001	Pendapatan Zakat	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
4.1.04.22.01.0002	Pendapatan Infaq	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	703.231.747.454,00	704.749.519.454,00	1.517.772.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	680.779.085.000,00	680.779.085.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur	33.979.938.000,00	33.979.938.000,00	0,00
4.2.01.03.03	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh	33.979.938.000,00	33.979.938.000,00	0,00
4.2.01.03.03.0002	Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur	6.472.729.300,00	6.472.729.300,00	0,00
4.2.01.03.03.0003	Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pemberdayaan Ekonomi Rakyat	8.395.813.226,00	8.395.813.226,00	0,00
4.2.01.03.03.0004	Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pengentasan Kemiskinan	5.045.477.332,00	5.045.477.332,00	0,00
4.2.01.03.03.0005	Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pendidikan	8.004.024.530,00	8.004.024.530,00	0,00
4.2.01.03.03.0006	Dana Otonomi Khusus-Aceh-Sosial	482.451.456,00	482.451.456,00	0,00
4.2.01.03.03.0007	Dana Otonomi Khusus-Aceh-Kesehatan	3.397.993.800,00	3.397.993.800,00	0,00
4.2.01.03.03.0008	Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pelaksanaan Keistimewaan Aceh	1.698.996.900,00	1.698.996.900,00	0,00
4.2.01.03.03.0009	Dana Otonomi Khusus-Aceh-Penguatan Perdamaian	482.451.456,00	482.451.456,00	0,00
4.2.01.05	Dana Desa	58.243.045.000,00	58.243.045.000,00	0,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	58.243.045.000,00	58.243.045.000,00	0,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	58.243.045.000,00	58.243.045.000,00	0,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	18.382.476.000,00	18.382.476.000,00	0,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	10.175.637.000,00	10.175.637.000,00	0,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	2.531.418.000,00	2.531.418.000,00	0,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	7.172.948.000,00	7.172.948.000,00	0,00
4.2.01.07.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	114.381.000,00	114.381.000,00	0,00
4.2.01.07.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	356.890.000,00	356.890.000,00	0,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	5.628.932.000,00	5.628.932.000,00	0,00
4.2.01.07.02.0001	DBH SDA Minyak Bumi	799.438.000,00	799.438.000,00	0,00
4.2.01.07.02.0002	DBH SDA Gas Bumi	850.114.000,00	850.114.000,00	0,00
4.2.01.07.02.0003	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	9.425.000,00	9.425.000,00	0,00
4.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	3.066.665.000,00	3.066.665.000,00	0,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	5.216.000,00	5.216.000,00	0,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	898.074.000,00	898.074.000,00	0,00
4.2.01.07.03	DBH Lainnya	2.577.907.000,00	2.577.907.000,00	0,00
4.2.01.07.03.0001	DBH Sawit	2.577.907.000,00	2.577.907.000,00	0,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	462.146.834.000,00	462.146.834.000,00	0,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	379.773.854.000,00	379.773.854.000,00	0,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	379.773.854.000,00	379.773.854.000,00	0,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	82.372.980.000,00	82.372.980.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	30.270.483.000,00	30.270.483.000,00	0,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	26.078.672.000,00	26.078.672.000,00	0,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	26.023.825.000,00	26.023.825.000,00	0,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	108.026.792.000,00	108.026.792.000,00	0,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	26.738.778.000,00	26.738.778.000,00	0,00
4.2.01.09.01.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	349.970.000,00	349.970.000,00	0,00
4.2.01.09.01.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	292.560.000,00	292.560.000,00	0,00
4.2.01.09.01.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	66.500.000,00	66.500.000,00	0,00
4.2.01.09.01.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	4.350.391.000,00	4.350.391.000,00	0,00
4.2.01.09.01.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	4.037.480.000,00	4.037.480.000,00	0,00
4.2.01.09.01.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	17.641.877.000,00	17.641.877.000,00	0,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	81.288.014.000,00	81.288.014.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	19.483.000.000,00	19.483.000.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.032.000.000,00	1.032.000.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	43.529.177.000,00	43.529.177.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	415.500.000,00	415.500.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3.104.221.000,00	3.104.221.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.162.190.000,00	2.162.190.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660.000,00	400.660.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	170.226.000,00	170.226.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	3.095.400.000,00	3.095.400.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	3.318.900.000,00	3.318.900.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.366.740.000,00	4.366.740.000,00	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	22.452.662.454,00	23.970.434.454,00	1.517.772.000,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	22.452.662.454,00	22.452.662.454,00	0,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	22.452.662.454,00	22.452.662.454,00	0,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	13.658.608.392,00	13.658.608.392,00	0,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	35.158.427,00	35.158.427,00	0,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	8.758.895.635,00	8.758.895.635,00	0,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0,00	1.517.772.000,00	1.517.772.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0,00	1.517.772.000,00	1.517.772.000,00
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	0,00	1.517.772.000,00	1.517.772.000,00
	Jumlah Pendapatan	913.838.093.664,00	915.355.865.664,00	1.517.772.000,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	714.733.198.827,00	741.770.666.580,00	27.037.467.753,00
5.1.01	Belanja Pegawai	438.136.209.082,00	423.427.852.068,00	-14.708.357.014,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	329.402.765.640,00	314.989.056.026,00	-14.413.709.614,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	244.893.044.605,00	229.786.087.413,00	-15.106.957.192,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	178.666.304.133,00	178.885.151.786,00	218.847.653,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	66.226.740.472,00	50.900.935.627,00	-15.325.804.845,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	21.980.608.922,00	19.861.870.717,00	-2.118.738.205,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14.959.096.840,00	14.984.001.666,00	24.904.826,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	7.021.512.082,00	4.877.869.051,00	-2.143.643.031,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.170.519.200,00	5.180.597.800,00	10.078.600,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.170.519.200,00	5.180.597.800,00	10.078.600,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	14.982.177.640,00	15.085.985.440,00	103.807.800,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14.695.876.440,00	14.800.080.240,00	104.203.800,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	286.301.200,00	285.905.200,00	-396.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	6.715.869.400,00	5.704.864.000,00	-1.011.005.400,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.517.349.800,00	2.576.944.400,00	59.594.600,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	4.198.519.600,00	3.127.919.600,00	-1.070.600.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	14.109.199.675,00	12.393.530.136,00	-1.715.669.539,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	8.629.011.013,00	8.632.180.174,00	3.169.161,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	5.480.188.662,00	3.761.349.962,00	-1.718.838.700,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.140.197.292,00	2.510.414.912,00	1.370.217.620,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.140.197.292,00	2.510.414.912,00	1.370.217.620,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	68.570.379,00	79.220.365,00	10.649.986,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	57.564.284,00	57.564.284,00	0,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	11.006.095,00	21.656.081,00	10.649.986,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	16.908.688.075,00	21.037.238.241,00	4.128.550.166,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	14.346.333.198,00	17.937.801.545,00	3.591.468.347,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.562.354.877,00	3.099.436.696,00	537.081.819,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	592.102.423,00	574.334.099,00	-17.768.324,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	437.960.569,00	437.960.569,00	0,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	154.141.854,00	136.373.530,00	-17.768.324,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.656.342.347,00	1.604.612.073,00	-51.730.274,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1.205.893.940,00	1.205.893.940,00	0,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	450.448.407,00	398.718.133,00	-51.730.274,00
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	1.185.445.682,00	1.170.300.830,00	-15.144.852,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	886.189.309,00	886.189.309,00	0,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	299.256.373,00	284.111.521,00	-15.144.852,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	99.518.497.122,00	99.223.849.722,00	-294.647.400,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	24.456.405.905,00	24.456.405.905,00	0,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	24.456.405.905,00	24.456.405.905,00	0,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	6.636.712,00	6.636.712,00	0,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	6.636.712,00	6.636.712,00	0,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	26.519.622,00	26.519.622,00	0,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	26.519.622,00	26.519.622,00	0,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	25.238.239.608,00	25.238.239.608,00	0,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	25.238.239.608,00	25.238.239.608,00	0,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	49.790.695.275,00	49.496.047.875,00	-294.647.400,00
5.1.01.02.06.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel	25.150.000,00	104.202.600,00	79.052.600,00
5.1.01.02.06.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran	94.050.000,00	0,00	-94.050.000,00
5.1.01.02.06.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	22.050.000,00	22.050.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	87.575.000,00	87.575.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	279.650.000,00	0,00	-279.650.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.02.06.0023	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	10.862.650,00	10.862.650,00	0,00
5.1.01.02.06.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	34.890.000,00	34.890.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0030	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	3.226.000,00	3.226.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0035	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	30.189.000,00	30.189.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0036	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	15.267.000,00	15.267.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0041	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	814.250,00	814.250,00	0,00
5.1.01.02.06.0050	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	10.031.550,00	10.031.550,00	0,00
5.1.01.02.06.0056	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan	590.025,00	590.025,00	0,00
5.1.01.02.06.0059	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	250.000,00	250.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	48.559.174.800,00	48.559.174.800,00	0,00
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	594.000.000,00	594.000.000,00	0,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	8.320.916.315,00	8.320.916.315,00	0,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00	561.540.000,00	0,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00	561.540.000,00	0,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	78.615.600,00	78.615.600,00	0,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	78.615.600,00	78.615.600,00	0,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	90.694.000,00	90.694.000,00	0,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	90.694.000,00	90.694.000,00	0,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	48.220.500,00	48.220.500,00	0,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	48.220.500,00	48.220.500,00	0,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.359.000,00	814.359.000,00	0,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.359.000,00	814.359.000,00	0,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	79.839.900,00	79.839.900,00	0,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	79.839.900,00	79.839.900,00	0,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	10.413.900,00	10.413.900,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	10.413.900,00	10.413.900,00	0,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00	1.890.000.000,00	0,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00	1.890.000.000,00	0,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	157.500.000,00	157.500.000,00	0,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	157.500.000,00	157.500.000,00	0,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	1.560.173.415,00	1.560.173.415,00	0,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	53.203.415,00	53.203.415,00	0,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	149.170.000,00	149.170.000,00	0,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	1.346.400.000,00	1.346.400.000,00	0,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.640.000.000,00	2.640.000.000,00	0,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.640.000.000,00	2.640.000.000,00	0,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	159.560.000,00	159.560.000,00	0,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	159.560.000,00	159.560.000,00	0,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	183.150.005,00	183.150.005,00	0,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000,00	55.965.000,00	0,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000,00	55.965.000,00	0,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.925.500,00	7.925.500,00	0,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.925.500,00	7.925.500,00	0,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	99.061.500,00	99.061.500,00	0,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	99.061.500,00	99.061.500,00	0,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	10.229.712,00	10.229.712,00	0,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	10.229.712,00	10.229.712,00	0,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.532.963,00	1.532.963,00	0,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.532.963,00	1.532.963,00	0,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	235.330,00	235.330,00	0,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	235.330,00	235.330,00	0,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	600.000,00	600.000,00	0,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	600.000,00	600.000,00	0,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	710.880.000,00	710.880.000,00	0,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	110.880.000,00	0,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	110.880.000,00	0,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	265.636.286.699,00	286.238.558.566,00	20.602.271.867,00
5.1.02.01	Belanja Barang	22.784.831.061,00	30.350.682.002,00	7.565.850.941,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	22.784.831.061,00	30.350.682.002,00	7.565.850.941,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	31.162.000,00	31.162.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.372.597.192,00	2.392.579.542,00	19.982.350,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	121.020.250,00	121.020.250,00	0,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.881.887.550,00	2.845.357.080,00	-36.530.470,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	535.213.318,00	544.851.618,00	9.638.300,00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	19.580.000,00	19.580.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0022	Belanja Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	3.037.500,00	0,00	-3.037.500,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	4.031.590,00	4.031.590,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.800.927.733,00	1.876.313.860,00	75.386.127,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.509.614.253,00	2.604.328.958,00	94.714.705,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	309.953.000,00	305.020.000,00	-4.933.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	7.082.000,00	134.560.000,00	127.478.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	49.781.250,00	49.781.250,00	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	584.034.230,00	596.587.605,00	12.553.375,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	13.900.000,00	23.900.000,00	10.000.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	255.065.000,00	52.050.000,00	-203.015.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	233.452.400,00	233.452.400,00	0,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	7.881.000,00	603.416.204,00	595.535.204,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	47.700.000,00	6.049.422.000,00	6.001.722.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.081.399.600,00	1.080.911.450,00	-488.150,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.555.767.395,00	1.623.580.395,00	67.813.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.596.578.800,00	1.653.568.800,00	56.990.000,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	417.300.000,00	417.300.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	49.890.000,00	49.890.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	718.335.000,00	1.240.305.000,00	521.970.000,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	193.140.000,00	203.802.000,00	10.662.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	5.262.600.000,00	5.390.100.000,00	127.500.000,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	560.000,00	560.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	31.600.000,00	65.600.000,00	34.000.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	64.440.000,00	112.350.000,00	47.910.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	50.551.736.409,00	62.629.561.735,00	12.077.825.326,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	44.602.805.173,00	55.708.285.499,00	11.105.480.326,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.432.600.000,00	2.642.800.000,00	1.210.200.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.815.335.000,00	1.931.375.000,00	116.040.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	226.034.000,00	226.034.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	43.200.000,00	37.050.000,00	-6.150.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	849.600.000,00	873.600.000,00	24.000.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	232.200.000,00	234.600.000,00	2.400.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	2.693.682.000,00	2.703.767.000,00	10.085.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	225.450.000,00	228.850.000,00	3.400.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.916.840.000,00	3.944.560.000,00	2.027.720.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	934.740.000,00	1.865.540.000,00	930.800.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	291.750.000,00	329.150.000,00	37.400.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	273.000.000,00	408.200.000,00	135.200.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	48.000.000,00	86.400.000,00	38.400.000,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	147.900.000,00	236.300.000,00	88.400.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2.470.200.000,00	3.836.600.000,00	1.366.400.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	610.792.000,00	609.592.000,00	-1.200.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.111.950.000,00	2.468.750.000,00	356.800.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.540.917.632,00	2.543.492.632,00	2.575.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	8.182.646.000,00	8.265.926.000,00	83.280.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.274.640.000,00	2.426.640.000,00	152.000.000,00
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	58.650.000,00	109.650.000,00	51.000.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.274.400.000,00	1.293.600.000,00	19.200.000,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	50.190.000,00	59.790.000,00	9.600.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	375.150.000,00	378.550.000,00	3.400.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	20.550.000,00	17.550.000,00	-3.000.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	178.740.000,00	178.740.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	195.745.200,00	195.745.200,00	0,00
5.1.02.02.01.0057	Belanja Jasa Operator Kapal	21.600.000,00	31.200.000,00	9.600.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	158.200.000,00	158.000.000,00	-200.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	393.808.367,00	405.461.867,00	11.653.500,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	8.235.429.625,00	12.596.608.051,00	4.361.178.426,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	170.280.000,00	170.280.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	805.562.149,00	842.993.349,00	37.431.200,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	230.271.500,00	230.271.500,00	0,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	5.135.700,00	5.135.700,00	0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	446.886.000,00	474.753.200,00	27.867.200,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	162.500.000,00	162.500.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.172.990.000,00	2.172.990.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	10.440.000,00	10.440.000,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.250.829.936,00	1.331.469.936,00	80.640.000,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBU dan BP Kelas 3	183.321.600,00	183.321.600,00	0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	504.000.000,00	584.640.000,00	80.640.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	306.000,00	306.000,00	0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	458.202.336,00	458.202.336,00	0,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	864.992.000,00	528.497.000,00	-336.495.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	208.500.000,00	265.492.000,00	56.992.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	2.500.000,00	85.995.000,00	83.495.000,00
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	533.372.000,00	0,00	-533.372.000,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	107.620.000,00	147.010.000,00	39.390.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	562.129.300,00	527.429.300,00	-34.700.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	431.769.300,00	269.669.300,00	-162.100.000,00
5.1.02.02.05.0032	Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum	81.460.000,00	81.460.000,00	0,00
5.1.02.02.05.0038	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan I	0,00	89.600.000,00	89.600.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	4.500.000,00	0,00	-4.500.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	14.400.000,00	56.700.000,00	42.300.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00
5.1.02.02.09.0016	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Industri Pariwisata	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	249.200.000,00	249.200.000,00	0,00
5.1.02.02.10.0008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	249.200.000,00	249.200.000,00	0,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan ASN	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.021.780.000,00	4.064.680.000,00	1.042.900.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	17.400.000,00	1.060.100.000,00	1.042.700.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	3.004.380.000,00	3.004.580.000,00	200.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	4.609.351.380,00	4.601.351.380,00	-8.000.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.100.394.200,00	3.092.394.200,00	-8.000.000,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	82.602.000,00	82.602.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	922.032.200,00	922.032.200,00	0,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	294.000.000,00	294.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	306.000.000,00	246.000.000,00	-60.000.000,00
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	126.000.000,00	176.000.000,00	50.000.000,00
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	142.960.000,00	142.960.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	390.000.000,00	390.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	477.000.000,00	479.000.000,00	2.000.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	74.800.000,00	74.800.000,00	0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.508.957.180,00	1.508.957.180,00	0,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.508.957.180,00	1.508.957.180,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	9.106.820.049,00	10.072.965.649,00	966.145.600,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.106.820.049,00	10.072.965.649,00	966.145.600,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.732.455.549,00	7.117.467.149,00	385.011.600,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.374.364.500,00	2.955.498.500,00	581.134.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	900.000,00	1.350.000,00	450.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	0,00	0,00	0,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	900.000,00	1.350.000,00	450.000,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	900.000,00	1.350.000,00	450.000,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	14.776.543.800,00	14.776.543.800,00	0,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	14.388.428.800,00	14.388.428.800,00	0,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	13.356.428.800,00	13.356.428.800,00	0,00
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	1.032.000.000,00	1.032.000.000,00	0,00
5.1.02.89.02	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	364.015.000,00	364.015.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.89.02.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	364.015.000,00	364.015.000,00	0,00
5.1.02.89.03	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	24.100.000,00	24.100.000,00	0,00
5.1.02.89.03.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	24.100.000,00	24.100.000,00	0,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	163.806.104.000,00	163.806.104.000,00	0,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	163.806.104.000,00	163.806.104.000,00	0,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	163.806.104.000,00	163.806.104.000,00	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi	1.222.080.000,00	1.339.014.000,00	116.934.000,00
5.1.04.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	853.000.000,00	969.934.000,00	116.934.000,00
5.1.04.01.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	853.000.000,00	969.934.000,00	116.934.000,00
5.1.04.01.01.0001	Belanja Subsidi kepada BUMN	853.000.000,00	969.934.000,00	116.934.000,00
5.1.04.03	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	369.080.000,00	369.080.000,00	0,00
5.1.04.03.01	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	369.080.000,00	369.080.000,00	0,00
5.1.04.03.01.0001	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	369.080.000,00	369.080.000,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	9.738.623.046,00	11.798.619.946,00	2.059.996.900,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	6.202.400.000,00	8.262.396.900,00	2.059.996.900,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	6.202.400.000,00	6.202.400.000,00	0,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	6.202.400.000,00	6.202.400.000,00	0,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	2.059.996.900,00	2.059.996.900,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	2.059.996.900,00	2.059.996.900,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	2.773.100.000,00	2.773.100.000,00	0,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	1.673.100.000,00	1.673.100.000,00	0,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	1.673.100.000,00	1.673.100.000,00	0,00
5.1.05.06.03	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00
5.1.05.06.03.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	763.123.046,00	763.123.046,00	0,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	763.123.046,00	763.123.046,00	0,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	763.123.046,00	763.123.046,00	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0,00	18.966.622.000,00	18.966.622.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	0,00	13.774.150.000,00	13.774.150.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	8.774.150.000,00	8.774.150.000,00
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	8.774.150.000,00	8.774.150.000,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0,00	4.764.072.000,00	4.764.072.000,00
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	4.764.072.000,00	4.764.072.000,00
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	4.764.072.000,00	4.764.072.000,00
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	428.400.000,00	428.400.000,00
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	428.400.000,00	428.400.000,00
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	428.400.000,00	428.400.000,00
5.2	BELANJA MODAL	43.807.163.484,00	51.426.110.952,00	7.618.947.468,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.496.203.209,00	36.112.650.677,00	7.616.447.468,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	0,00	2.825.716.400,00	2.825.716.400,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	0,00	2.825.716.400,00	2.825.716.400,00
5.2.02.01.01.0003	Belanja Modal Excavator	0,00	2.825.716.400,00	2.825.716.400,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	3.518.808.350,00	4.202.889.600,00	684.081.250,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.518.808.350,00	4.202.889.600,00	684.081.250,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.220.000.000,00	2.220.000.000,00	0,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	995.000.000,00	1.108.889.600,00	113.889.600,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	303.808.350,00	874.000.000,00	570.191.650,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	604.615.900,00	604.615.900,00	0,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	604.615.900,00	604.615.900,00	0,00
5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	604.615.900,00	604.615.900,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	669.393.179,00	3.924.436.327,00	3.255.043.148,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	651.723.179,00	3.906.766.327,00	3.255.043.148,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	86.700.000,00	2.837.028.000,00	2.750.328.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	317.160.400,00	317.160.400,00	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	247.501.479,00	249.269.179,00	1.767.700,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	361.300,00	503.308.748,00	502.947.448,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	17.670.000,00	17.670.000,00	0,00
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	17.670.000,00	17.670.000,00	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	382.734.600,00	514.113.000,00	131.378.400,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	354.234.600,00	438.734.600,00	84.500.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	354.234.600,00	424.234.600,00	70.000.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	0,00	14.500.000,00	14.500.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	28.500.000,00	75.378.400,00	46.878.400,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00
5.2.02.06.02.0002	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio SSB	0,00	46.878.400,00	46.878.400,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	14.652.884.800,00	14.673.113.070,00	20.228.270,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	14.652.884.800,00	14.673.113.070,00	20.228.270,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	14.652.884.800,00	14.673.113.070,00	20.228.270,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	2.929.970.000,00	3.629.970.000,00	700.000.000,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	2.929.970.000,00	3.629.970.000,00	700.000.000,00
5.2.02.08.03.0009	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	149.970.000,00	149.970.000,00	0,00
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	2.780.000.000,00	3.480.000.000,00	700.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	794.015.200,00	794.015.200,00	0,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	590.031.400,00	590.031.400,00	0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	286.031.400,00	286.031.400,00	0,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	304.000.000,00	304.000.000,00	0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	203.983.800,00	203.983.800,00	0,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	203.983.800,00	203.983.800,00	0,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	1.643.781.180,00	1.643.781.180,00	0,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	1.609.996.180,00	1.609.996.180,00	0,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	1.609.996.180,00	1.609.996.180,00	0,00
5.2.02.89.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD	33.785.000,00	33.785.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.02.89.02.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD Reguler	33.785.000,00	33.785.000,00	0,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	0,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	0,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.464.853.360,00	6.464.853.360,00	0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	5.964.853.360,00	5.964.853.360,00	0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	5.899.853.360,00	5.899.853.360,00	0,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	3.567.093.360,00	3.567.093.360,00	0,00
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	1.033.760.000,00	1.033.760.000,00	0,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	1.144.000.000,00	1.144.000.000,00	0,00
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00
5.2.03.01.02.0012	Belanja Modal Rumah Tidak Bersusun	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.012.571.895,00	7.012.571.895,00	0,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	5.782.513.335,00	5.782.513.335,00	0,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	5.462.513.335,00	5.462.513.335,00	0,00
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	5.462.513.335,00	5.462.513.335,00	0,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	320.000.000,00	320.000.000,00	0,00
5.2.04.01.02.0010	Belanja Modal Jembatan Penyeberangan	320.000.000,00	320.000.000,00	0,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	1.230.058.560,00	1.230.058.560,00	0,00
5.2.04.02.02	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	1.075.058.560,00	1.075.058.560,00	0,00
5.2.04.02.02.0004	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	1.075.058.560,00	1.075.058.560,00	0,00
5.2.04.02.05	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00
5.2.04.02.05.0008	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.771.035.020,00	1.771.035.020,00	0,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	27.560.000,00	27.560.000,00	0,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	27.560.000,00	27.560.000,00	0,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	27.560.000,00	27.560.000,00	0,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	1.743.475.020,00	1.743.475.020,00	0,00
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	1.743.475.020,00	1.743.475.020,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	1.743.475.020,00	1.743.475.020,00	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	62.500.000,00	65.000.000,00	2.500.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	62.500.000,00	65.000.000,00	2.500.000,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	62.500.000,00	65.000.000,00	2.500.000,00
5.2.06.01.01.0002	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	2.500.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	34.415.107.860,00	12.265.577.200,00	-22.149.530.660,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	34.415.107.860,00	12.265.577.200,00	-22.149.530.660,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	34.415.107.860,00	12.265.577.200,00	-22.149.530.660,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	34.415.107.860,00	12.265.577.200,00	-22.149.530.660,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	34.415.107.860,00	12.265.577.200,00	-22.149.530.660,00
5.4	BELANJA TRANSFER	126.091.119.493,00	115.102.006.932,00	-10.989.112.561,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.672.467.868,00	3.672.467.868,00	0,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	3.390.573.818,00	3.390.573.818,00	0,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.390.573.818,00	3.390.573.818,00	0,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.390.573.818,00	3.390.573.818,00	0,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	281.894.050,00	281.894.050,00	0,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	281.894.050,00	281.894.050,00	0,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	281.894.050,00	281.894.050,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	122.418.651.625,00	111.429.539.064,00	-10.989.112.561,00
5.4.02.02	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	16.483.668.843,00	5.494.556.282,00	-10.989.112.561,00
5.4.02.02.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota	16.483.668.843,00	5.494.556.282,00	-10.989.112.561,00
5.4.02.02.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	16.483.668.843,00	5.494.556.282,00	-10.989.112.561,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	105.934.982.782,00	105.934.982.782,00	0,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	105.934.982.782,00	105.934.982.782,00	0,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	58.243.045.000,00	58.243.045.000,00	0,00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	47.691.937.782,00	47.691.937.782,00	0,00
	Jumlah Belanja	919.046.589.664,00	920.564.361.664,00	1.517.772.000,00
	Total Surplus/(Defisit)	-5.208.496.000,00	-5.208.496.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.208.496.000,00	5.208.496.000,00	0,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.208.496.000,00	5.208.496.000,00	0,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	5.208.496.000,00	5.208.496.000,00	0,00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	5.208.496.000,00	5.208.496.000,00	0,00
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	5.208.496.000,00	5.208.496.000,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	5.208.496.000,00	5.208.496.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	5.208.496.000,00	5.208.496.000,00	0,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Walikota Langsa

JEFFRY SENTANA S PUTRA